

l.



BPPBJ

Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Prov. DKI Jakarta

**RENCANA KERJA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat disusun tepat waktu dengan baik.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

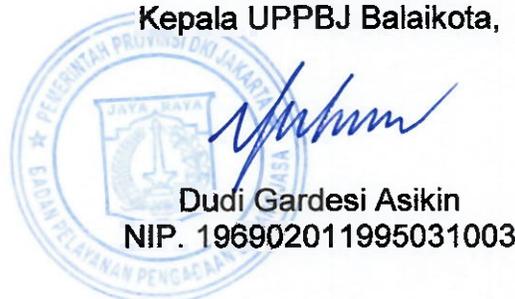
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja BPPBJ Tahun 2024 mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja BPPBJ Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra BPPBJ Tahun 2023-2026 yang telah disusun.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta ini, baik secara substansi perencanaan pembangunan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta penyelarasan dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam berkolaborasi guna membangun kota Jakarta yang kita cintai bersama ini.

Jakarta, 21 Juli 2023

a.n. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
Kepala UPPBJ Balaikota,



Dudi Gardesi Asikin
NIP. 196902011995031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 – 2026 yang merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Selain itu, penyusunan Renja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026 sebagai penjabaran dari RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026.

BPPBJ dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) serta pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tertentu. BPPBJ memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari BPPBJ Provinsi DKI Jakarta pada Renstra BPPBJ Tahun 2023 - 2026 adalah **Terlaksananya Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**. Program dan indikator kinerja yang mendukung sasaran Renstra BPPBJ yaitu **Perbaikan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang menerapkan prinsip *value for money* di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** adalah **Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa** dengan Indikator Kinerja: **Persentase Pengadaan Barang/Jasa tepat waktu**.

Proses penyusunan Renja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta mengacu RKPD Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja BPPBJ tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2023 dalam Renstra BPPBJ Tahun 2023 - 2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Tujuan dan Sasaran BPPBJ Tahun 2024 mendukung tercapainya Misi ke-4 RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu **“Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang bekarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas”**.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu dan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta hasil pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang terdiri atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilengkapi dengan kinerja, indikator kinerja serta satuan.

Dengan harapan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan, BPPBJ diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam percepatan pencapaian Sasaran BPPBJ menjadi lebih baik dan sesuai dengan target.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 2 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH | |
| TAHUN 2022 | 8 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa | 9 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa | 17 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta | 19 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja PD | 19 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 25 |
| BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH | 26 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 27 |
| 3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020- 2024..... | 27 |
| 3.1.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 | 27 |
| 3.1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)..... | 28 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 28 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 29 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... | 30 |
| BAB V PENUTUP | 36 |
| Lampiran I Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa s.d. Tahun 2023 | |
| Lampiran II Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa s.d. Tahun 2022 | |
| Lampiran III Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024 Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta | |

Lampiran IV Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Lampiran V Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023-2026

Lampiran VI Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,
Sistematika Penulisan



1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang membuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunannya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah 2023-2026 dan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam pasal 15 ayat (1) diamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang telah disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sedangkan Renstra PD Tahun 2023-2026 yang telah disusun menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dengan tujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran serta prakiraan maju. Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada RKPD Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta mengacu pada RKPD- Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja BPPBJ disusun secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD-Tahun 2024. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2024 dalam Renstra BPPBJ Tahun 2023-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
22. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Permen PPN / Kepala Bappenas No 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Normenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
32. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

34. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005;
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
37. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
39. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
40. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
41. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
42. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
43. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
44. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
45. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
46. Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
47. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
48. Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Tipe III dan Tipe IV Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
49. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 53/SE/2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Renstra BPPBJ ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPBJ Tahun 2024;
3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas BPPBJ.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025, prioritas pembangunan tahun 2023-2026 adalah mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berdasarkan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang meningkat. Sesuai dengan arah kebijakan tahun 2024 pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, arah kebijakan pembangunan pada Tahun 2024 adalah **"Peningkatan Ketahanan Kota melalui Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar"**.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja BPPBJ disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Bab ini menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hasil pelaksanaan sampai dengan triwulan IV tahun 2022.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi tentang garis besar rencana program dan prioritas Perangkat Daerah dalam Renja Tahun 2024.

BAB V : PENUTUP

Bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 yang berisi uraian catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU



Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review Ranwal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Pada sub bab ini dijelaskan target dan realisasi anggaran program serta evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BPPBJ sampai dengan Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023. Fungsi evaluasi dilaksanakan dalam rangka penyediaan informasi yang berguna dalam menentukan strategi dan kegiatan BPPBJ tahun 2024. Evaluasi atau revidi akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan BPPBJ tahun 2022 serta realisasi target sasaran Renstra BPPBJ pada Tahun 2022. Selain itu juga akan dilakukan revidi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2023. Revidi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPBJ Tahun 2022 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa s.d. Tahun 2023

| Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026) | Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 | | Keterangan |
|--|----------|-----------|-----------|---|----|--|--|---|--|----------------------------|-------------|--|---|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja tahun 2022 | Capaian (%) | | Realisasi Program/Keg /Sub Keg s/d 2023 | Capaian Renstra (%) | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/5) | 12 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | | | | | Unsur penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | | | | Keuangan | | | | | | | | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | | | Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu | 90 | 95 | 96,02 | 101 | 82,5 | 82,5 | 100 | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 01 | 02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 02 | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah | Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026) | Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 | | Keterangan |
|--|------|----|----|---|----|----|--|--|---|--|----------------------------|-------------|---|---|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja tahun 2022 | Capaian (%) | | Realisasi Program/Keg /Sub Keg s/d 2023 | Capaian Renstra (%) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/5) | 12 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 02 | 01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 02 | 02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/jasa | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 02 | 03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | 600 | 600 | 100 | 6 | 6 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 03 | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | 12 | 12 | 100 | 4 | 4 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 02 | 03 | Pendampingan, Konsultansi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | 12 | 12 | 100 | 4 | 4 | | |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah | Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026) | Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 | | Keterangan |
|--|------|----|----|---|----|----|--|---|---|--|----------------------------|-------------|---|---|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja tahun 2022 | Capaian (%) | | Realisasi Program/Keg /Sub Keg s/d 2023 | Capaian Renstra (%) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/5) | 12 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 03 | 01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa | | 210 | 210 | 100 | 105 | 105 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 4 | 4 | 100 | 186 | 186 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | | | | | 4 | 4 | | |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah | Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026) | Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 | | Keterangan |
|--|------|----|----|---|----|----|--|--|---|--|----------------------------|-------------|--|---|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja tahun 2022 | Capaian (%) | | Realisasi Program/Keg /Sub Keg s/d 2023 | Capaian Renstra (%) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/5) | 12 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | | | | | 1 | 1 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | | 01 | 01 | 1 | 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | | |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah | Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026) | Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 | | Keterangan |
|--|------|----|----|---|----|----|--|---|---|--|----------------------------|-------------|--|---|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja tahun 2022 | Capaian (%) | | Realisasi Program/Keg /Sub Keg s/d 2023 | Capaian Renstra (%) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/5) | 12 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang efisien | | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 07 | 05 | Pengadaan mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | | | | | 1 | 1 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | | | | | 19 | 1 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4 | 4 | | |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah | Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026) | Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 | | Keterangan |
|--|------|----|----|---|----|----|--|---|---|--|----------------------------|-------------|---|---|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja tahun 2022 | Capaian (%) | | Realisasi Program/Keg /Sub Keg s/d 2023 | Capaian Renstra (%) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/5) | 12 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | | | | | 4 | 4 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4 | 4 | | |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah | Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026) | Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 | | Keterangan |
|--|------|----|----|---|----|----|---|--|---|--|----------------------------|-------------|---|---|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Target Renja tahun 2022 | Realisasi Renja tahun 2022 | Capaian (%) | | Realisasi Program/Keg /Sub Keg s/d 2023 | Capaian Renstra (%) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/5) | 12 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | 02 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 4 | 4 | 100 | 22 | 22 | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 250 | 250 | 100 | 125 | 250 | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Analisis kinerja pelayanan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Analisis kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal pada indikator penyelesaian tender tepat waktu. Pada dokumen Renstra BPPBJ Tahun 2023-2026, indikator kinerja BPPBJ pada program ini adalah Persentase Pengadaan Barang/Jasa tepat waktu. Rumus yang digunakan untuk perhitungan pengadaan barang/jasa tepat waktu adalah jumlah tender tepat waktu dibagi jumlah tender yang sudah selesai dikalikan 100%.

Realisasi pada indikator Persentase Pengadaan Barang /Jasa Tepat waktu pada tahun 2022 adalah 96,02%. Realisasi pada indikator tersebut mencapai target yang ditetapkan sebesar 95% pada Tahun 2022.

Secara umum analisis BPPBJ disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa s.d. Tahun 2022

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Target Rencana Strategis Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|---|--|-------|------|-------|----------------------|-------------------|----------|-------|---------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat waktu | - | <p>Definisi: Jumlah pengadaan barang/jasa tepat waktu dibagi jumlah paket tender yang sudah selesai dikali 100. Tepat waktu adalah lebih cepat atau sama dengan standar waktu sesuai ketentuan atau peraturan tentang Pemilihan Penyedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pra Kualifikasi (55 hari Kalender) b. Tender Pengadaan barang (27 Hari Kalender) c. Tender Jasa Lainnya (27 Hari Kalender) d. Tender Pekerjaan Konstruksi (30 Hari Kalender) e. Tender cepat (20 Hari Kalender) f. Penunjukkan Langsung (14 Hari Kalender) <p>Berdasarkan SK Kepala BPPBJ No. 124 Tahun 2021 yang mengacu Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021.</p> <p>Metode Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah tender tepat waktu}}{\text{Jumlah tender sudah selesai}} \times 100 \%$</p> <p>Sumber Data: Laporan Seluruh UPPBJ</p> | 95% | 82,5% | 85% | 87,5% | 96,02% | 96.17% (TW II) | 85% | 87,5% | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

Isu-isu penting yang dihadapi BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dari hasil telaah pelayanan BPPBJ; tujuan dan sasaran RPD an renstra LKPP hingga lima tahun mendatang dapat dikelompokkan ke dalam 3 aspek berikut :

1. Kebijakan :

- a) Penyusunan SK Gubernur atau SK Kepala BPPBJ tentang pedoman dan standar proses pengadaan barang/jasa terintegrasi yang mencakup proses utama dan proses pendukung;
- b) Kebijakan Pemprov DKI Jakarta atas implementasi inisiatif strategis untuk percepatan pengadaan dan penciptaan *value for money* di pengadaan barang/jasa.

2. Proses Pengadaan :

- a) Implementasi prosedur pengadaan barang/jasa yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- b) Rekomendasi dari BPPBJ atas strategi yang akan diterapkan pada pelaksanaan paket pengadaan tahun berikutnya;
- c) Penyediaan pusat informasi layanan pengadaan barang/jasa (fungsi kehumasan) dalam mengelola setiap tuntutan, pertanyaan, permintaan dan ataupun penyebaran informasi pengadaan barang/jasa ke pihak eksternal.

3. Hukum :

- a) Pelaksanaan FGD permasalahan barang/jasa;
- b) Pendampingan dan konsultasi kasus hukum;
- c) Pendokumentasian pustaka risiko dalam rangka penerapan manajemen risiko dalam proses pengadaan barang/jasa.

4. Sumber Daya Manusi :

- a) Pengemabangan kompetensi dan karir pelaksana pengadaan;
- b) Peningkatan dan pembinaan SDM pengelola pengadaan;
- c) Penerapan sistem informasi kepegawaian terintegrasi dengan sistem informasi pengadaan barang/jasa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja PD

Berisikan uraian mengenai:

Perbandingan antara rancangan awal Renja PD dengan hasil analisis kebutuhan tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Lampiran tabel berikut.

**Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta**

Nama Perangkat Daerah: Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

| No. | Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024 | | | | | Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-------------|--|----------------|--------------------------|---|-------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| 1 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | DKI Jakarta | Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu | 85 | 4.514.081.992 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | DKI Jakarta | Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu | 85 | 7.102.223.072 | |
| 2 | Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 1.231.588.512 | Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 1.036.800.000 | |
| 3 | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 12 | 1.231.588.512 | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 12 | 1.036.800.000 | |
| 4 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 4 | 2.472.818.520 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 4 | 5.592.423.072 | |
| 5 | Pengeloaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 6 | 1.702.418.520 | Pengeloaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 6 | 5.194.623.072 | |
| 6 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/jasa | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 2 | 745.200.000 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/jasa | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 2 | 372.600.000 | |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| No. | Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024 | | | | | Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-------------|--|----------------|--------------------------|---|-------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 7 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 6 | 25.200.000 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 6 | 25.200.000 | |
| 8 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 340.874.960 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 473.000.000 | |
| 9 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | DKI Jakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 105 | 340.874.960 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | DKI Jakarta | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 105 | 396.800.000 | |
| 10 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa | DKI Jakarta | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 468.800.000 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa | DKI Jakarta | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 76.200.000 | |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 94.298.897.181 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 91.663.273.203 | |
| 12 | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | 86.910.819.625 | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | 86.910.819.625 | |
| 13 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DKI Jakarta | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 192 | 86.897.569.625 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DKI Jakarta | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 192 | 86.897.569.625 | |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| No. | Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024 | | | | | Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-------------|---|----------------|--------------------------|--|-------------|---|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 14 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | DKI Jakarta | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 13.250.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | DKI Jakarta | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 13.250.000 | |
| 15 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | 2.873.055.805 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | 1.405.366.677 | |
| 16 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | DKI Jakarta | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 1.292.121.074 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | DKI Jakarta | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 490.820.724 | |
| 17 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DKI Jakarta | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 67.150.738 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DKI Jakarta | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 15.964.631 | |
| 18 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DKI Jakarta | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 1 | 53.819.282 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DKI Jakarta | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 1 | 41.958.000 | |
| 19 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | DKI Jakarta | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | 1 | 316.996.446 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | DKI Jakarta | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | 1 | 101.298.822 | |
| 20 | Penyediaan Bahan/Material | DKI Jakarta | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 | 154.512.000 | Penyediaan Bahan/Material | DKI Jakarta | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 | 104.850.000 | |
| 21 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | DKI Jakarta | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 4 | 629.620.000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | DKI Jakarta | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 4 | 285.958.000 | |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| No. | Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024 | | | | | Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-------------|---|----------------|--------------------------|--|-------------|---|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 22 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | DKI Jakarta | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 | 358.836.264 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | DKI Jakarta | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 | 358.800.000 | |
| 23 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | DKI Jakarta | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - | - | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | DKI Jakarta | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | 5.716.500 | |
| 24 | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang efisien | 4 | 1.236.881.547 | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang efisien | 4 | 98.382.084 | |
| 25 | Pengadaan mebel | DKI Jakarta | Jumlah paket mebel yang disediakan | 87 | 1.197.942.636 | Pengadaan mebel | DKI Jakarta | Jumlah paket mebel yang disediakan | 87 | 40.124.622 | |
| 26 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | DKI Jakarta | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 1 | 38.938.911 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | DKI Jakarta | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 1 | 58.257.462 | |
| 27 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 2.877.033.570 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 2.988.949.017 | |
| 28 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | DKI Jakarta | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 4 | 634.300.100 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | DKI Jakarta | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 4 | 705.182.770 | |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| No. | Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024 | | | | | Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-------------|--|----------------|--------------------------|---|-------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 29 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 340.219.440 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 296.343.360 | |
| 30 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | 1.902.514.030 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DKI Jakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | 1.987.422.887 | |
| 31 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 401.106.635 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DKI Jakarta | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 | 259.755.800 | |
| 32 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | DKI Jakarta | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 | 188.086.590 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | DKI Jakarta | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 | 134.159.300 | |
| 33 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DKI Jakarta | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 560 | 213.020.045 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DKI Jakarta | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 560 | 125.596.500 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPPBJ tidak memiliki usulan program kegiatan masyarakat karena fungsi organisasi adalah melayani Pengadaan Barang/Jasa sesuai usulan dari PD/UKPD.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan



3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan dalam menyusun Renja Tahun 2024 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut :

1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
6. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Merujuk kepada 7 agenda tersebut, tidak ada yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan Keuangan.

3.1.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan tema RKP Tahun 2024, yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut kemudian didukung dan diturunkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional, 8 (delapan) Arah Kebijakan, dan 3 (tiga) strategi kebijakan tahun 2024 sebagaimana berikut:

- a) PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- b) PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
- c) PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d) PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e) PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f) PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- g) PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Merujuk kepada 7 (tujuh) Prioritas Nasional diatas tidak ada yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.

3.1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals



Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki keterkaitan erat terhadap 17 tujuan TPB/SGs.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah "Transformasi Jakarta Sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia".

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 merujuk kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Di mana tujuannya adalah mendukung tercapainya Misi ke-4 RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, secara berurutan yaitu "Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang bekarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas". Sehingga tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023-2026

| No | Tujuan BPPBJ | Sasaran BPPBJ | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | | | |
|----|--|---|---|--|------|------|------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Terlaksananya Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa | 71 | 71 | 75 | 81 |
| 2 | Terlaksananya Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Perbaikan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang menerapkan Prinsip <i>Values For Money</i> | Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 4 | 4 | 4 |

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2024 menggunakan program yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri dari 1 program utama dan 1 program operasional antara lain sebagai berikut :

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT



Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

| Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|---|------|----|----|---|----|----|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | | | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | | | | | | Unsur penunjang Urusan Pemerintahan | | DKI Jakarta | | | | | | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | | | | | Keuangan | | DKI Jakarta | | 98.765.496.275 | | | | 98.765.496.275 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | | | | Program kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu | DKI Jakarta | 85 | 7.102.223.072 | PAD | | 87,5 | 7.102.223.072 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 01 | | Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | DKI Jakarta | 4 | 1.036.800.000 | PAD | | 4 | 1.036.800.000 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 01 | 02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | DKI Jakarta | 12 | 1.036.800.000 | PAD | | 12 | 1.036.800.000 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 02 | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | DKI Jakarta | 4 | 5.592.423.072 | PAD | | 4 | 5.592.423.072 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 02 | 01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | DKI Jakarta | 6 | 5.194.623.072 | PAD | | 6 | 5.194.623.072 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 02 | 02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/jasa | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | DKI Jakarta | 2 | 372.600.000 | PAD | | 2 | 372.600.000 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 02 | 03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | DKI Jakarta | 6 | 25.200.000 | PAD | | 6 | 25.200.000 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 03 | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | DKI Jakarta | 4 | 473.000.000 | PAD | | 4 | 473.000.000 |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|---|------|----|----|---|----|----|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | | | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 02 | 03 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa | DKI Jakarta | 105 | 76.200.000 | PAD | | 105 | 76.200.000 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 07 | 1 | 03 | 01 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | DKI Jakarta | 4 | 396.800.000 | PAD | | 4 | 396.800.000 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DKI Jakarta | 4 | 91.663.273.203 | PAD | | 4 | 91.663.273.203 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | DKI Jakarta | 4 | 86.910.819.625 | PAD | | 4 | 86.910.819.625 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | DKI Jakarta | 186 | 86.897.569.625 | PAD | | 198 | 86.897.569.625 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | DKI Jakarta | 1 | 13.250.000 | PAD | | 1 | 13.250.000 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | DKI Jakarta | 4 | 1.405.366.677 | PAD | | 4 | 1.405.366.677 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | DKI Jakarta | 1 | 490.820.724 | PAD | | 1 | 490.820.724 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | DKI Jakarta | 1 | 15.964.631 | PAD | | 1 | 15.964.631 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | | 01 | 01 | 1 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | DKI Jakarta | 1 | 41.958.000 | PAD | | 1 | 41.958.000 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan | DKI Jakarta | 1 | 101.298.822 | PAD | | 1 | 101.298.822 |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|---|------|----|----|---|----|----|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | | | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | DKI Jakarta | 1 | 104.850.000 | PAD | | 1 | 104.850.000 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DKI Jakarta | 4 | 285.958.000 | PAD | | 4 | 285.958.000 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | DKI Jakarta | 1 | 358.800.000 | PAD | | 1 | 358.800.000 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | DKI Jakarta | 1 | 5.716.500 | PAD | | 1 | 5.716.500 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien | DKI Jakarta | 4 | 98.382.084 | PAD | | 4 | 98.382.084 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 07 | 05 | Pengadaan mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | DKI Jakarta | 1 | 40.124.622 | PAD | | 1 | 40.124.622 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | DKI Jakarta | 86 | 58.257.462 | PAD | | 87 | 58.257.462 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DKI Jakarta | 4 | 2.988.949.017 | PAD | | 4 | 2.988.949.017 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DKI Jakarta | 4 | 705.182.770 | PAD | | 4 | 705.182.770 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | DKI Jakarta | 1 | 296.343.360 | PAD | | 1 | 296.343.360 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | DKI Jakarta | 4 | 1.987.422.887 | PAD | | 4 | 1.987.422.887 |

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

| Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|---|------|----|----|---|----|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DKI Jakarta | 4 | 259.755.800 | PAD | | 4 | 259.755.800 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | 02 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | DKI Jakarta | 22 | 134.159.300 | PAD | | 22 | 134.159.300 |
| Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 4 | 01 | 01 | 1 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatn dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | DKI Jakarta | 560 | 125.596.500 | PAD | | 125 | 125.596.500 |

Sebagai salah satu inisiatif atas terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem pengadaan barang/jasa yang optimal diharapkan mampu mempertajam belanja daerah baik itu belanja yang dilaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah/ Badan Layanan Umum Daerah/ Unit Pelayanan Teknis/ Unit lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau belanja yang dilaksanakan secara tidak langsung yang dilakukan oleh penerima bantuan sosial dan subsidi. Selain itu, sistem pengadaan barang/jasa yang optimal juga diharapkan berdampak pada pembentukan ekosistem pasar barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbuka untuk persaingan pelaku usaha yang pada akhirnya mendorong efisiensi belanja daerah. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembaungan Daerah Tahun 2023-2026 ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengintegrasikan seluruh proses pengadaan barang/jasa dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang merupakan *mirroring* sistem LKPP serta mengembangkan e-katalog daerah. Untuk mendukung pengembangan UMKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa akan terus mengembangkan aplikasi E-order. Sampai dengan tahun 2023 pengadaan langsung belanja makan/minum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan 100% melalui *e-order*.

Rencana Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa diampu dalam 2 (dua) program :

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

PENUTUP



Dokumen Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2023-2026. Fungsi Dokumen Renja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sebagai upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2024.

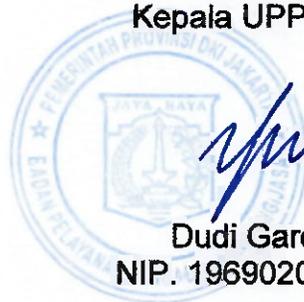
Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2024 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2024 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024;
3. Pelaksanaan DPA tahun 2024 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa setiap 3 bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2024.

Diharapkan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk percepatan pencapaian Sasaran menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPD 2023-2026 dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Jakarta, 21 Juli 2023

a.n. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
Kepala UPPBJ Balaikota,



Dudi Gardesi Asikin
NIP. 196902011995031003